



KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI JAWA BARAT  
NOMOR : 188.341/KEP.DPRD-10/2020

TENTANG

PERUBAHAN KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI JAWA BARAT NOMOR 188.341/KEP.DPRD-20/2019  
TENTANG PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH  
PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2020

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI JAWA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat Gubernur Jawa Barat Nomor 188.342/4015/Hukham Tanggal 16 September 2020 Hal Usulan Revisi Raperda Pada Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2020, maka terhadap Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2020 perlu diadakan perubahan;
- b. bahwa penetapan Perubahan Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2020 sebagaimana dimaksud huruf a, ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara tanggal 4 Juli 1950) Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2018, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2012 Nomor 3 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 117) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Jawa Barat Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2015 Nomor 4 seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 183);
10. Peraturan DPRD Provinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib DPRD Provinsi Jawa Barat;

Memperhatikan : Rapat Paripurna DPRD Provinsi Jawa Barat tanggal 2 November 2020.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA BARAT NOMOR 188.341/KEP.DPRD-20/2019 TENTANG PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan perubahan Program Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2020 semula sebanyak 11 (sebelas) rancangan peraturan daerah menjadi 15 (lima belas) rancangan peraturan daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Perubahan Program Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2020 sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU terdiri dari :

1. 5 (lima) rancangan peraturan daerah yang merupakan usul prakarsa DPRD.
2. 10 (sepuluh) rancangan peraturan daerah yang berasal dari Gubernur.

KETIGA : Penambahan 4 (empat) rancangan peraturan daerah usul Gubernur, yaitu :

1. Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Bentuk Hukum PD BPR di Daerah Kabupaten Bogor, Kabupaten Indramayu, dan Kabupaten Cirebon Menjadi Perseroan Terbatas;
2. Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Pada PT BPR di Daerah Kabupaten Bogor, Kabupaten Indramayu, dan Kabupaten Cirebon;
3. Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum, Dan Perlindungan Masyarakat;
4. Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018 – 2023.

KEEMPAT : Hal lain yang diatur dalam Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 188.341/Kep.DPRD-20/2019 tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2020, dinyatakan masih berlaku.

- KELIMA : Laporan Badan Pembentukan Peraturan Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 2 November 2020

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI JAWA BARAT

Wakil Ketua,

Wakil Ketua,

ttd

ttd

ACHMAD RU'YAT

OLEH SOLEH

LAMPIRAN : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI  
JAWA BARAT  
NOMOR : 188.341/KEP.DPRD-09/2020  
TANGGAL : 2 November 2020  
TENTANG : PERUBAHAN KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI JAWA BARAT NOMOR 188.341/KEP.DPRD-20/2019  
TENTANG PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH PROVINSI  
JAWA BARAT TAHUN 2020

**A. RAPERDA USUL PRAKARSA DPRD SEBANYAK 5 (LIMA) RAPERDA, YAITU:**

1. RAPERDA TENTANG PASAR PUSAT DISTRIBUSI;
2. RAPERDA TENTANG DESA WISATA;
3. RAPERDA TENTANG PENGELOLAAN JARINGAN FIBER OPTIK JAWA BARAT;
4. RAPERDA TENTANG KEPARIWISATAAN DI PROVINSI JAWA BARAT; DAN
5. RAPERDA TENTANG TATA KELOLA PENELITIAN, PENGEMBANGAN DAN PENERAPAN ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI JAWA BARAT.

**B. RAPERDA USUL GUBERNUR SEBANYAK 10 (SEPULUH) RAPERDA, YAITU:**

1. RAPERDA TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2020 – 2040;
2. RAPERDA TENTANG PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN ANAK;
3. RAPERDA TENTANG PENYELENGGARAAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN;
4. RAPERDA TENTANG PERUBAHAN PERDA NOMOR 8 TAHUN 2013 TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN PERKEBUNAN;
5. RAPERDA TENTANG PERLINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA DI JAWA BARAT;
6. RAPERDA TENTANG PENYELENGGARAAN PESANTREN;
7. RAPERDA TENTANG PERUBAHAN BENTUK HUKUM PD BPR DI DAERAH KABUPATEN BOGOR, KABUPATEN INDRAMAYU, DAN KABUPATEN CIREBON MENJADI PERSEROAN TERBATAS;
8. RAPERDA TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT PADA PT BPR DI DAERAH KABUPATEN BOGOR, KABUPATEN INDRAMAYU, DAN KABUPATEN CIREBON;
9. RAPERDA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT NOMOR 13 TAHUN 2018 TENTANG PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT; DAN
10. RAPERDA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT NOMOR 8 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2018 – 2023.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI JAWA BARAT

Wakil Ketua,

Wakil Ketua,

ttd

ttd

ACHMAD RUYAT

OLEH SOLEH